

## **Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara**

**Kamilaus Konstase Oki <sup>1</sup>, Damiana Mediantini Lafu <sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia  
E-mail: Okitance@gmail.com

### **Abstrak**

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis karena menyentuh kepentingan masyarakat. Desa Noebaun merupakan salah satu desa di kabupaten Timor Tengah Utara mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) secara mandiri. Masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengelolaan dana desa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap good governance, kesejahteraan masyarakat desa Noebaun. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan menginterpretasi hubungan pengelolaan dana desa terhadap good governance, tingkat kesejahteraan masyarakat desa Noebaun secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini dilakukan di desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah masyarakat desa Noebaun, tokoh masyarakat dan seluruh perangkat desa. Alat analisis yang digunakan adalah smartPLS. Hasil analisis penelitian menunjukkan, pengelolaan dana desa berpengaruh positif secara langsung terhadap good governance namun tidak positif terhadap kesejahteraan, namun hubungan tersebut akan menjadi positif ketika dimediasi oleh faktor good governance. Hubungan langsung good governance terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah positif. Proses pemanfaatan dana desa melibatkan semua pihak mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Orientasi dana desa masih pada infrastruktur disebabkan karena kemampuan perangkat desa dalam merancang usulan program dari masyarakat. Proses perencanaan harusnya berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan mendorong industri kecil. Faktor penting adalah peningkatan kualitas perangkat desa melalui pendidikan formal dan informal.

**Kata kunci:** dana desa, tata kelolah, kesejahteraan

### **Abstrak**

*The Development of village had important role and strategis because of influencing society. Noebaun Village was a village in Timor Tengah Utara District that managed of Budget Village (ADD) for independent. The problem of this activity how to allocate*

*village bugeting that affected for direct and indirect to get good government, public welfare in Noebaun Village. The aim of this research was to analyse and to interpret the correlation of alocation the village budget for the good government, level of public village which had affected direct and indirect. The research was conducted in Neobaun village Timor Tengah Utara District. The population and sample for this research was Noebaun Society, village public figure and all village aparature. The tools of this analysis which was needed with smartPLS. The result showed that the allocation of budget village had affected postive for direct good government but negative for the welfare althought this correlation would be positive when the mediator of the good government. The direct correlation for good government for the welfare level was positive. The process of the village budget utilization began from planning the responsibility. The orientation of budgeting village by infrastructure because of the capacty of the village aparature in designing of the program from the society. The planning process should have been oriented by economic development orientation for the society with pushed up small industry. The important factor was to increase quality of the village aparature with formal and informal education.*

**Keywords :** *Village budget, good governance, welfare*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Desa merupakan organisasi pemerintahan resmi yang terendah. Berdasarkan undang undang desa No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, otonomi diberikan secara leluasa untuk memanfaatkan potensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan bersifat *block grand* artinya desa diberi hak otonomi untuk membangun perencanaan, melakukan pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan sampai pada pertanggung-jawaban.

Otonomi daerah memberi dampak positif pada masyarakat desa karena pemerintah bersedia memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai perencanaan tingkat kebutuhan. Sekalipun demikian masyarakat diberi kemandirian namun tetap mengacuh pada mekanisme penggunaan dana tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti *Good Governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian maka dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari

individu dan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (8) mengemukakan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat desa dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang dikenal dengan otonomi desa. Adanya otonomi desa ini diharapkan akan mempercepat perputaran roda ekonomi di desa yang nantinya akan mempengaruhi wilayah sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dimana desa tersebut berada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Sebagaimana desa lain di Indonesia, desa Noebaun merupakan suatu desa kecil di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diberi kesempatan untuk mengelolah dana desa untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Semenjak tahun 2015 desa Noebaun diberi kesempatan untuk mengelolah dana desa. Artinya kurang lebih sudah 3 tahun terakhir desa Noebaun telah mengelola dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui ditransfer APBD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkeadilan dan sejahterah.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) yaitu pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, komisaris, dan pengawas BUMDes. Dengan adanya kegiatan-kegiatan dengan anggaran dana desa tersebut dan pengelolaan yang baik maka diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun makin meningkat setiap tahun.

Alokasi Dana Desa Noebaun mengalami peningkatan setiap tahun. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh karena kreasi masyarakat membangun perencanaan sesuai tingkat kebutuhan dan potensi desa. Hal juga karena faktor kepercayaan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan peningkatan akibat manfaat positif diperoleh masyarakat dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

## **2. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini;

1. Bagaimana pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara

2. Bagaimana pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Bagaimana *good governance* berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Apakah *good governance* mampu memediasi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis dan menginterpretasi pengaruh pengelolaan dana desa terhadap *good governance* Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara
2. Untuk menganalisis dan menginterpretasi berpengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Untuk menganalisis dan menginterpretasi berpengaruh *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Mengetahui dan menganalisis faktor *good governance* memediasi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan bahwa upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Proses perencanaan pembangunan desa merupakan

tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Thomas (2013), pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok orang melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, dan 38 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hidayah dan Iin Wijayanti (2017) melakukan penelitian tentang pengelolaan dana desa Wonodadi Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode perencanaan penggunaan dana desa telah menerapkan prinsip partisipasi, namun berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan program kerja belum dilakukan sebagaimana yang diinginkan dalam undang-undang akan transparansi dan keterbukaan pada publik.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu oleh Makalang (2017), dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif, ditemukan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sudah sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Namun dalam penelitian juga ditemukan bahwa kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan

kendala utama, sehingga perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa. Ini mengindikasikan bahwa faktor pengelolah dari pihak pemerintah desa sangat dalam menciptakan tata kelolah yang baik (*Good Governance*).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengatakan bahwa menurut United Nation Development Programme (UNDP, 1997) yang dikutip Sedarmayanti (2007), mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: *Participation* (Partisipasi), *Rule of Law* (Aturan Hukum), *Transparency* (Transparansi), *Responsiveness* (Daya Tanggap), *Consensus orientation* (Berorientasi konsensus), *Equity* (Berkeadilan), *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan efisiensi), *Accountability* (Akuntabilitas), dan *Strategic vision* (Visi Strategis).

Penyelenggaraan pemerintah desa bertujuan untuk memberikan kesejahteraan akan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin. Menurut Badrudin (2012), kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan ekonomi. Sedangkan menurut Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan

peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Stiglitz (2011), rumusan kesejahteraan diperhitungkan berdasarkan dimensi-dimensi pokok meliputi; (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi dan kekayaan), (2) kesehatan, (3) pendidikan, (4) aktivitas individu, termasuk bekerja, (5) suara politik dan tata pemerintahan, (6) hubungan dan kekerabatan sosial, (7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), dan ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2018 di Desa Noebaun Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh masyarakat desa Noebaun sebagai pelaku dan pengguna dana desa dan perangkat desa yang keseluruhan berjumlah 1.569 responden. Proses penentuan jumlah sampel dengan menggunakan metode yang disampaikan oleh Slovin dalam Riduwan (2007) diperoleh 94 orang sebagai responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat dan perangkat desa Noebaun sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen penggunaan dana desa dan instansi terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung dengan mengamati proses pelaksanaan penggunaan dana desa secara bertahap dan melakukan

wawancara secara terbuka dan tertutup dengan menggunakan koesioner atau daftar pertanyaan yang disediakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel endogen dan eksogen. Variabel eksogen adalah pengelolaan dana desa ( $X_1$ ), dan endogen adalah *good governance* ( $Y_1$ ), dan variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ). Untuk menganalisis penelitian ini alat uji statistik yang digunakan dengan uji persamaan struktural berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 3.0*.

Menurut Ghozali (2006) metode *Partial Least Square* dijelaskan sebagai model persamaan struktural berbasis *variance* mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*). Penulis menggunakan *Partial Least Square* dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Langkah-langkah dalam analisa data dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dalam penelitian ini adalah sebagai adalah;

- 1) Merancang Model Pengukuran

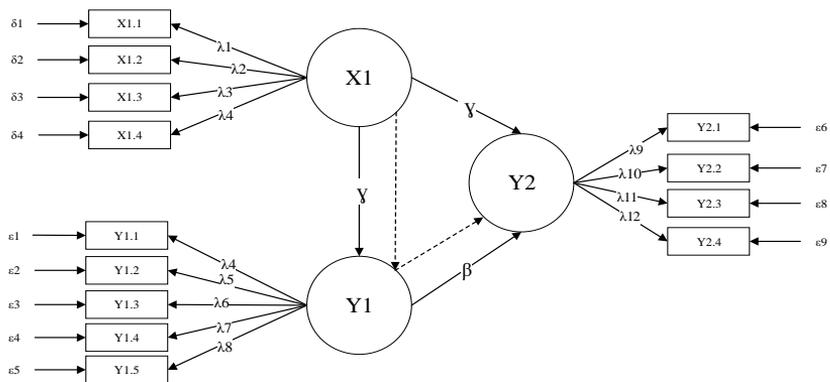
Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*.

2) Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari satu variabel laten eksogen (pengelolaan dana desa) dan dua variabel laten endogen (*good governance* dan kesejahteraan masyarakat).

3) Membangun Diagram Jalur

Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Secara lengkap model struktural pada penelitian ini nampak pada gambar 1 berikut;



**Gambar 1.**  
Struktur Analisis Variabel Penelitian secara Keseluruhan

Keterangan :

$X_1$  = Pengelolaan Dana Desa

$Y_1$  = Good Governance

$Y_2$  = Kesejahteraan masyarakat

$\lambda$  = Bobot faktor laten variabel dengan indikatornya

$\delta$  = Kesalahan pengukuran indikator Exogenous Latent Variable

$\epsilon$  = Kesalahan pengukuran indikator Endogenous Latent Variable

$\beta$  = Koefisien pengaruh langsung antara Endogenous Latent Variable dan Endogenous Latent Variable

$\gamma$  = Koefisien pengaruh langsung antara Exogenous Latent Variable dan Endogenous Latent Variable

Untuk memahami gambar diatas, maka Tabel 1. dibawah ini menjelaskan mengenai vadiabel dan indikator digunakan dalam model struktural.

**Tabel 1.**  
Lambang Statistik untuk Indikator dan Variabel yang Diteliti

Lambang	Indikator	Lambang	Variabel
$X_{1,1}$	Perencanaan	$X_1$	Pengelolaan Dana Desa
$X_{1,2}$	Pelaksanaan		
$X_{1,3}$	Pertanggungjawaban		
$Y_{1,1}$	Partisipasi	$Y_1$	<i>Good Governance</i>
$Y_{1,2}$	Transparansi		
$Y_{1,3}$	Daya tanggap		
$Y_{1,4}$	Efisien dan efektif		
$Y_{1,5}$	Akuntabel		
$Y_{2,1}$	Tingkat pendapatan	$Y_2$	Kesejahteraan masyarakat
$Y_{2,2}$	Pelayanan pendidikan		
$Y_{2,3}$	Pelayanan kesehatan		
$Y_{2,4}$	Sarana prasarana		

#### 4) Menjabarkan Diagram Jalur ke dalam Persamaan Matematis

Berdasarkan model penelitian pada tahap dua diatas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:

- a. Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.
- b. Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitian.

Persamaan matematis dalam penelitian ini yang telah dijelaskan pada diagram jalur adalah:

Persamaan model struktural (*inner model*)

$$Y_1 = \gamma_1 X_1 + \delta_1 \dots\dots\dots(3.1)$$

$$Y_2 = \gamma_{12} X_1 + \beta_1 Y_1 + \delta_2 \dots\dots\dots(3.2)$$

Persamaan model pengukuran (*outer model*)

a) Pengukuran Variabel Eksogen

$$X_{1,1} = \lambda_1 X_1 + \delta_1 \dots\dots\dots(3.3)$$

$$X_{1,2} = \lambda_2 X_1 + \delta_2 \dots\dots\dots(3.4)$$

$$X_{1,3} = \lambda_3 X_1 + \delta_3 \dots\dots\dots(3.5)$$

b) Pengukuran Variabel Endogen

$$Y_{1,1} = \lambda_{1,1} Y_1 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(3.6)$$

$$Y_{1,2} = \lambda_{1,2} Y_1 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(3.7)$$

$$Y_{1,3} = \lambda_{1,3} Y_1 + \varepsilon_3 \dots\dots\dots(3.8)$$

$$Y_{1,4} = \lambda_{1,4} Y_1 + \varepsilon_4 \dots\dots\dots(3.9)$$

$$Y_{1,5} = \lambda_{1,5} Y_1 + \varepsilon_5 \dots\dots\dots(3.10)$$

$$Y_{2,1} = \lambda_{2,1} Y_2 + \varepsilon_5 \dots\dots\dots(3.11)$$

$$Y_{2,2} = \lambda_{2,2} Y_2 + \varepsilon_6 \dots\dots\dots(3.12)$$

$$Y_{2,3} = \lambda_{2,3} Y_2 + \varepsilon_7 \dots\dots\dots(3.13)$$

$$Y_{2,4} = \lambda_{2,4} Y_2 + \varepsilon_8 \dots\dots\dots(3.14)$$

Interpretasi model atau hasil pengujian tahap ini disesuaikan dengan data teori dan analar

### 5) Estimasi

Pada tahap ini nilai  $\gamma, \beta$  dan  $\lambda$  yang terdapat pada langkah diestimasi menggunakan program *SmartPLS*. Dasar yang digunakan dalam estimasi adalah *resampling* dengan *Bootestrapping*. Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).

### 6) Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari dua jenis, yaitu Uji Kecocokan Model Pengukuran (*Outer Model*) dan Uji Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Kategori koefisien korelasi di atas, maka kriteria penilaian koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kriteria Penilaian Koefisien Korelasi**

Nilai Korelasi Koefisien	Interpretasi	Tafsiran
$> 0,20$	<i>Slight correlation; Almost negligible relationship</i>	Sangat Rendah
$0,20 \leq r < 0,40$	<i>Low correlation; Definite but small relationship</i>	Rendah
$0,40 \leq r < 0,70$	<i>Moderate correlation; Substantial relationship</i>	Sedang/Cukup
$0,70 \leq r < 0,90$	<i>High correlation; Marked relationship</i>	Tinggi
$0,90 \leq r < 1,00$	<i>Very high correlation; Very dependable relationship</i>	Sangat Tinggi

Sumber: Guilford dalam Abdillah

Koefisien hubungan antar variabel tersebut signifikan secara statistik yaitu dengan nilai *t-statistic*  $\geq 1,645$ . Taraf nyata atau taraf keberartian ( $\alpha$ ) dalam penelitian ini adalah 0,05, dimana di dalam tabel distribusi normal nilainya adalah 1,645. Apabila nilai *t-statistic*  $\geq 1,645$  berarti ada suatu hubungan atau pengaruh antar variabel dan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan semakin baik (Abdillah dan Hartono, 2015).

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$  atau *R-square*) mendekati nilai 1. Nilai  $R^2$  untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai  $R^2$  menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu menerangkan variabel endogen. Nilai  $R^2$  ini dalam PLS disebut juga *Q-square predictive relevance*. Besarnya  $R^2$  tidak pernah negatif dan paling besar sama dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$ , berarti semakin baik model yang dihasilkan (Uce Indahyanti, 2013).

Pengukuran  $R^2$  yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran Guilford sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Kriteria Penilaian Koefisien Determinasi**

Nilai Koefisien Determinasi	Tafsiran
$> 0,40$	Sangat Rendah
$0,40 \leq R_2 < 0,16$	Rendah
$0,16 \leq R_2 < 0,49$	Sedang/Cukup
$0,49 \leq R_2 < 0,81$	Tinggi
$0,81 \leq R_2 < 1,00$	Sangat Tinggi

Sumber: Guilford dalam Abdillah

Hipotesa yang terbangun dalam penelitian ini adalah;

- a) Hipotesis pertama adalah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b) Hipotesis kedua adalah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c) Hipotesis ketiga adalah *good governance* berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara.

- d) Hipotesis keempat adalah pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* dalam meningkatkan kesejahteraan Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara.

#### D. Hasil Penelitian

Uji kecocokan model pengukuran (*Outer Model*) digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas dengan kriteria yang digunakan yakni validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Validitas konvergen dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan korelasi antara item *score* atau *component* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Validitas konvergen (*convergent validity*) dievaluasi dalam dua tahap, yaitu indikator validitas (dilihat dari nilai faktor *loading* dan *t-statistic*) dan reliabilitas konstruk (dilihat dari nilai output *Composite Reliability* (CR)).

*Outer loading* antar variabel dan indikator menampilkan hasil pengujian validitas konvergen untuk melihat *loading factor*. Hubungan tersebut terlihat pada Tabel 4. berikut;

**Tabel 4**  
***Outer Loadings* Indikator Terhadap Konstruk**

	X1	Y1	Y2
X1.1	0,970		
X1.2	0,973		
X1.3	0,974		
Y1.1		0,717	
Y1.2		0,853	
Y1.3		0,826	
Y1.4		0,783	
Y1.5		0,885	
Y2.1			0,946
Y2.2			0,700

Y2.3	0,955
Y2.4	0,934

Sumber data: *Output SmartPLS 3.0*

Pada Tabel 4. nampak bahwa *Outer Loadings* seluruh konstruk mempunyai nilai *loading factor* diatas 0,5. Ini menunjukkan bahwa nilai korelasi antar indikator dan konstruk cukup tinggi. Menurut Chin (2003), nilai outer loading apabila  $> 0,7$  maka dikatakan memiliki korelasi yang sangat kuat dan apabila nilai outer loading tersebut berada pada kisaran 0,5 dan 0,6 masih dianggap cukup. Dengan demikian, semakin tinggi nilai faktor, maka semakin tinggi peranan loading dalam menginterpretasikan matrik faktor.

Nilai *disriminant validity* terukur melalui nilai *cross loading*. Nilai tersebut dikatakan akan lebih baik apabila hubungan antar indikator dan konstruk jauh lebih baik jika terhadap konstruk lainnya. Secara jelas dapat dilihat pada Tabel 5. berikut

**Tabel 5.**  
Nilai *Cross Loading* Indikator Terhadap Konstruk

	X1	Y1	Y2
X1.1	0,970	0,483	0,374
X1.2	0,973	0,557	0,370
X1.3	0,974	0,539	0,356
Y1.1	0,360	0,717	0,597
Y1.2	0,349	0,853	0,717
Y1.3	0,402	0,826	0,660
Y1.4	0,631	0,783	0,528
Y1.5	0,458	0,885	0,738
Y2.1	0,383	0,775	0,946
Y2.2	0,278	0,530	0,700
Y2.3	0,364	0,781	0,955
Y2.4	0,310	0,722	0,934

Sumber : Hasil *output* analisis data *smart PLS 3.0*

Data *cross loadings* terlihat bahwa *cross loading* antar indikator terhadap konstruk jauh lebih besar daripada indikator terhadap konstruk lainnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan indikator terhadap konstruknya memiliki keeratan dan bukan pada konstruk lainnya. Tingkat *validitas discriminan* selanjutnya bukan saja diukur dengan *cross loadings* namun juga menggunakan *Average Variance Extracted (AVE)*. Kriteria AVE harus  $> 0,5$  dan nilai *cross loadings* antar indikator dengan konstruknya harus lebih besar dari nilai korelasi.

Kelayakan nilai validitas discriminan dan *Average Variance Extracted* umumnya digunakan pada indikator reflektif yang bertujuan untuk mengukur konsistensi internal suatu konstruk. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3, bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* rata-rata diatas 0,5. Dengan demikian maka hubungan antar indikator dan konstruk dianggap baik. Secara jelas dapat dilihat pada Tabel 6. berikut;

**Tabel 6.**  
**Nilai AVE Variabel Laten Dengan Indikator Reflektif**

	AVE
X1	0,971
Y1	0,872
Y2	0,908

Sumber :Hasil *output* analisis data *smart PLS 3.0*

Model struktural (*inner model*) dimaksudkan untuk pengujian antar konstruk (variabel laten). Untuk mengetahui model struktural tersebut dilihat dari nilai  $R^2$  dan  $Q^2$  . Berdasarkan nilai  $R^2$  tersebut, hubungan antar variabel dikategorikan kuat jika nilai  $R^2 > 0,75$ , dikategorikan “*substansial*” jika  $R^2$  sebesar 0,67 dan kategori moderat jika

$R^2$  sebesar 0,33 dan kategori rendah jika  $R^2$  sebesar 0,19 (Abdilah dan Hartono, 2015). Nilai *R-Square* ( $R^2$ ) hasil analisis dengan menggunakan SEM-PLS dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 4.4

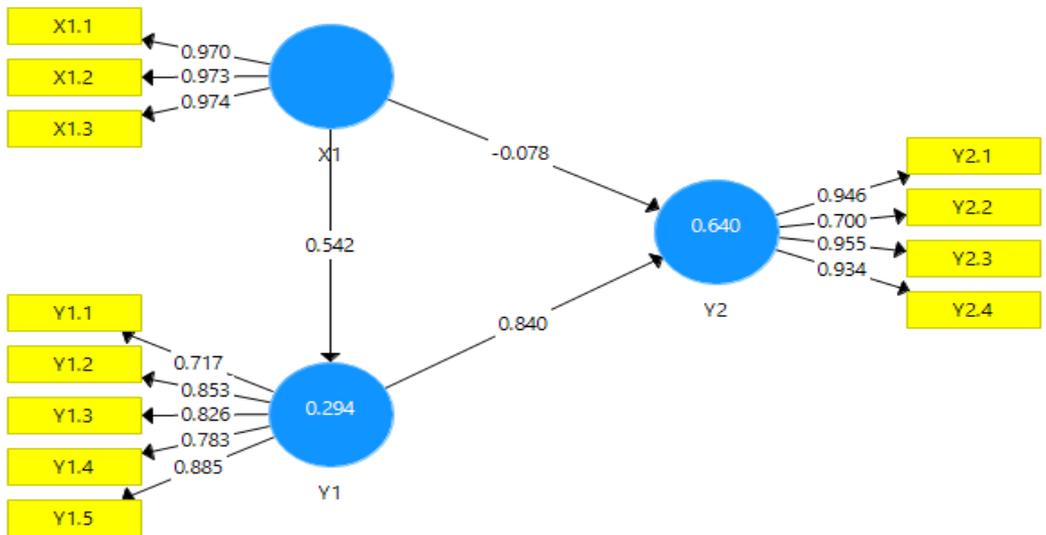
**Tabel 7.**  
Nilai R-Square Untuk Konstruk

	R Square	Keterangan
Y1	0,29	Lemah
Y2	0,64	Moderat

Sumber :Hasil Output analisis data SmartPLS 3.0

Dari data pada Tabel 7 tersebut, nampak terlihat bahwa nilai konstruk *Good Governance* sebesar 0,29 atau 29 persen dan nilai hubungan tersebut dikatakan lemah. Artinya nilai konstruk *good governance* dibentuk oleh konstruk pengelolaan dana desa sebesar 29 persen dan sisanya sebesar 71 persen dibentuk oleh konstruk lain diluar model. Pada konstruk kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) nilai pembentuk konstruk sebesar 0,64 atau 64 persen dan nilai konstruk tersebut dikatakan moderat. Artinya nilai pembentuk konstruk kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) dibentuk oleh konstruk pengelolaan dana desa ( $X_1$ ) sebesar 64 persen dan sisanya dibentuk oleh variabel lain diluar model.

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* berbasis variance dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil pengujian *Full Model SEM Algorithm* ada pada gambar berikut:



**Gambar 2.**  
Uji Full Model PLS Algorithm

Dari hasil pengujian data kuisisioner menggunakan *SmartPLS* 3.0 tersebut diketahui bahwa bobot variabel laten ( $X_1$ ,  $Y_1$ , dan  $Y_2$ ) terhadap indikator-indikatornya lebih besar dari ( $>$ ) 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa variabel eksogen pengelolaan dana desa maupun variabel endogen *good governance* dan kesejahteraan masyarakat membentuk indikator-indikatornya secara baik dibuktikan dengan nilai tiap variabel laten terhadap indikator-indikatornya seperti pada bagan diatas lebih besar daripada 0,7.

Pengaruh langsung mencerminkan hubungan langsung antara variabel laten yang satu dengan variabel laten lain. Dalam penelitian ini ada beberapa pengaruh langsung yang terlihat pada output *SmartPLS* dalam bentuk Tabel *Path Coefficients*. Pengaruh langsung antar variabel konstruk dapat dilihat pada hasil analisis yang ditampilkan dalam Tabel 4.5 berikut;

Tabel 8.  
Pengaruh langsung (*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X1 -> Y1	0,542	0,550	0,067	8,065	0,000
X1 -> Y2	-0,078	-0,091	0,085	0,926	0,357
Y1 -> Y2	0,840	0,859	0,063	13,371	0,000

Sumber : Output analisis data SmartPLS 3.0

Ket : \*) signifikan pada  $\alpha = 5\%$

X1= Pengelolaan Dana Desa; Y1= Good Governance; Y2= Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan nilai koefisien jalur (*path coefficient*) pada Gambar 2 dan Tabel 8. nampak bahwa hubungan langsung variabel dana desa ( $X_1$ ) berpengaruh positif pada *good governance* ( $Y_1$ ) sebesar 0,542. Sebaliknya dana desa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif terhadap *good governance* ( $Y_1$ ) yakni -0,078. Pada hubungan antar konstruk *good governance* ( $Y_1$ ) memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ).

Nilai koefisien pengaruh langsung antara variabel eksogen pengelolaan dana desa terhadap variabel endogen *good governance* sebesar 0,542 menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Selain itu, pengaruh variabel pengelolaan dana desa terhadap *good governance* adalah positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa demi mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dikemukakan oleh United Nation Development Programe (UNDP, 1997) bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip *participation*

(partisipasi), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (daya tanggap), *effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi) dan *accountability* (akuntabilitas) dalam melakukan segala aktivitas atau program pembangunan.

Berdasarkan teori diatas dan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa Noebaun telah mengikuti prosedur peraturan yang ada secara baik yaitu proses pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini diketahui dari hasil penelitian dan informasi yang diperoleh dari kepala desa dan aparat desa dalam hal ini yang bertugas sebagai pengelola dana desa yang menyatakan bahwa terdapat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan langsung pengelolaan dana desa terhadap *good governance* adalah 0,542. Dengan demikian dari hasil penelitian yang dilakukan, maka hipotesis pertama yang terbangun diawal berdasarkan pada asumsi teori dan literatur lainnya bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara diterima.

Nilai koefisien pengaruh langsung antara variabel pengelolaan dana desa ( $X_1$ ) terhadap variabel kesejahteraan masyarakat ( $Y_2$ ) sebesar -0,078 menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat bernilai negatif karena nilai parameter koefisien bernilai negatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_1$  ditolak karena pengelolaan dana desa memiliki hubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial ekonomi mencakup efektivitas dan prioritas penggunaan dana desa, prinsip dan tahap yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menurut Thomas (2003), pengelolaan dana desa harus terbangun melalui kematangan perencanaan berdasarkan pada tingkat kebutuhan prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya desa.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, disebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaan dana desa tersebut, otonomi desa dibutuhkan sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penggunaan dana desa masih dominan dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan rabat penghubung antar perkampungan, fasilitas pendidikan dasar (PAUD & TK), sedangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih minim alokasi. Ini menunjukkan bahwa secara kematangan tim perencanaan belum mengarahkan pemberdayaan secara langsung pada pengembangan ekonomi masyarakat namun masih berorientasi pada pengembangan infrastruktur.

Nilai koefisien pengaruh langsung antara variabel *good governance* terhadap variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0,840 menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh variabel *good governance* terhadap

kesejahteraan masyarakat juga bernilai positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat di desa Noebaun. Berdasarkan hasil uji *smartPLS Algorithm* diperoleh nilai koefisien pengaruh langsung untuk variabel *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,840 menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh variabel *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat juga bernilai positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang terbangun pada asumsi teori dan literatur lainnya bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Noebaun dapat diterima.

Prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip *Participation* (partisipasi), *Transparency* (transparansi), *Responsiveness* (daya tanggap), *Effectiveness and efficiency* (efektifitas dan efisiensi) dan *Accountability* (akuntabilitas) dalam melakukan segala aktivitas atau program pembangunan.

Pengaruh tidak langsung (*indirect effects*), nampak bahwa dana desa berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui *good governance* terlihat bahwa nilai koefisien 0,455 (*indirect effect* :  $0,542 \times 0,840$ ) dengan tingkat probabilitas 0,034 pada *Confidence Intervals*. Mengingat bahwa hubungan konstruk pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui *good governance* berpengaruh positif dan signifikan. Secara lengkap terlihat pada Tabel 4.6 berikut;

Tabel 9.  
Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effects*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV)	P Values
X1 -> Y1					
X1 -> Y2	0,455	0,473	0,070	6,521	0,000
Y1 -> Y2					

Sumber : Output analisis data SmartPLS 3.0

Ket : \*) signifikan pada  $\alpha = 5\%$

X1= Pengelolaan Dana Desa; Y1= *Good Governance*; Y2= Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *good governance* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Noebaun. Berdasarkan penjelasan hasil pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut sejalan dengan teori Todaro dan Smith (2006) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada pemerataan distribusi kebutuhan dasar, penyediaan infrastruktur dan skala pilihan dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara tata kelolah program kerja dan anggaran.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka ada beberapa kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini;

- a) Pengelolaan dana desa berjalan sangat berkaitan dengan sistem penyelenggara pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola program kerja dan transparansi (*good governance*). Pemanfaatan dana desa di desa Noebaun sesuai tingkat kebutuhan karena terbangun melalui proses yang terbuka karena diusulkan sendiri oleh masyarakat.
- b) Pengelolaan dana desa Noebaun sebagian besar penggunaan orientasi pada pembangun fisik dengan konsentrasi pada kelengkapan infrastruktur berupa rabat jalan raya, pembangunan gedung-gedung sekolah (PAUD dan TK). Alokasi dana dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas dan sangat minim perencanaannya setiap tahun.
- c) Keterbatasan sumber daya aparatur desa sebagai perangkat dalam merancang program kerja dan masih berorientasi program yang cenderung sama dan tidak mengalami pembaharuan.

## **2. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan maka ada beberapa saran dalam penelitian ini;

- a) Perencanaan program penggunaan dana desa yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat terus memperhatikan kebutuhan skala prioritas masyarakat.
- b) Orientasi perencanaan program difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal berupa pengembangan industri kecil (UMKM) dan perlahan meminimalisir program pengadaan dan pekerjaan fisik.

- c) Kualitas sumber daya apatur terus diperbaiki dengan perekrutan sumber daya memiliki tingkat pendidikan yang cukup dan mengikuti pendidikan ekstra berupa pelatihan-pelatihan berkaitan dengan perancangan program, adminstrasi, dan catatan penggunaan keuangan sesuai standar operasional akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Hartono, Jogiyanto.2015. *Partial Least Square (PLS). Alternatif Structural Equations Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. N. (2003). *A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/adoption study*. *Information Systems Research*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Hasniati. 2016. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa)*.
- Hidayah, Nurul dan Iin Wijayanti. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*.
- Kholmi, Masiyah. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)*.
- Makalang, Astri Juniati. (2017) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*.
- Manaan, Maria F. V. F. 2017. *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)*.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rambe, A. 2004. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah (Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung (eJurnal Pemerintahan Integratif. Volume 1, Nomor 1, Halaman 51-64)*.
- Todaro, Michael. Smith, Stephen C. 2006. *Economic Development*. Edisi Kesembilan, Jilid 1. (Drs. Haris Munandar, M.A.; Puji A.L., S.E, Trans). Jakarta: Penerbit Erlangga. (Pearson Education Limited, United Kingdom diterbitkan tahun 2006).
- Widiyanti, Arista. 2016. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*.